

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pernah dilakukan tentang masalah penelitian evaluasi kebijakan terhadap kantor pemerintahan daerah maupun terhadap dinas – dinas atau instansi – instansi yang ada pada kantor pemerintahan daerah baik dengan pendekatan metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif, baik dengan teori evaluasi yang sama dengan penelitian ini maupun dengan menggunakan teori yang berbeda. Dibawah ini penelitian memaparkan tentang penelitian terdahulu yang relevan diantaranya :

Penelitian Muhammad Lukman Al Hakim (2015) melakukan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya. Penelitian ini didasarkan pada masalah evaluasi pemeliharaan jalan di Surabaya belum efektif yang ditandai dengan masih banyaknya jalanan yang rusak di kota Surabaya.

Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya menggunakan metode kualitatif. Dengan metode teknik wawancara mendalam dengan pihak evaluator yang sudah pernah melakukan evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan di Surabaya. Dengan metode ini peneliti memberikan laporan hasil proses data secara objektif tentang masalah yang diteliti dengan pendekatan deduktif yang kemudian melakukan ekplanasi sehingga dapat memberikan kejelasan secara tuntas dan dapat dipercaya serta memberikan makna terhadap berbagai data dan konsep pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Surabaya belum maksimal hal ini dibuktikan dengan Hasil kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Surabaya masih kurang pemantauan dan peninjauan lebih lanjut secara komprehensif setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut karena itu jalan-jalan di Surabaya masih banyak yang hanya tambal sulam sehingga hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dalam arti waktu tahun anggaran hingga penyusunan kebijakan pemeliharaan jalan tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya, kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Surabaya masih kurang dalam segi waktu

pekerjaan yang seringkali dilakukan di siang hari ketika lalu lintas sedang berada di puncak kepadatannya sehingga menyebabkan kemacetan sementara, yang membuat masyarakat terganggu, terdapat ketidakpastian yang sangat besar kemungkinannya dikarenakan oleh kurang tanggapnya pihak pelaksana kebijakan tersebut dalam menangani keluhan-keluhan dari masyarakat sebagai pengguna jalan.

Penelitian Rasminto (2018) melakukan penelitian tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Pertanian di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini didasarkan pada masalah evaluasi kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi belum efektif.

Penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Pertanian di Kabupaten Bekasi menggunakan metode kualitatif. Dengan metode teknik wawancara mendalam, dengan metode ini peneliti memberikan laporan hasil proses data secara objektif tentang masalah yang diteliti dengan pendekatan deduktif yang kemudian melakukan ekplanasi sehingga dapat memberikan kejelasan secara tuntas dan dapat dipercaya serta memberikan makna terhadap berbagai data dan konsep pada penelitian ini.

Kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi pada prinsipnya seharusnya sangat baik dalam menyelaraskan aspek sosial ekonomi masyarakat dan aspek keseimbangan lingkungannya, namun fakta di lapangan banyak terjadi penyimpangan dan inkonsistensi Pemerintah Daerah dalam implementasinya. Dengan ditandainya pemberian ijin pembangunan perumahan maupun pabrik-pabrik di atas lahan pertanian sehingga luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi sampai pada awal tahun 2016 mengalami penurunan 22,7 % dibandingkan tahun 2011 sebagaimana awal Perda RT/RW Kabupaten Bekasi diterapkan. Jika hal ini tidak menjadi bahan perhatian serius, sangat dimungkinkan bahwa Kabupaten Bekasi yang awalnya menjadi salah satu lumbung padi Provinsi Jawa Barat akan berubah menjadi daerah industri dan pemukiman, selain itu hal yang paling memprihatinkan adalah masyarakat lokal yang awalnya merupakan mayoritas bekerja sebagai petani akan kehilangan matapencahariannya dan akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem lingkungan karena lahan pertanian berkurang dan bahkan makin sempit karena berubah menjadi lahan pemukiman dan lahan industri tersebut.

Program Evaluation: Implementation of Tourism Village Development by I Gede Sudirtha dkk (2019) Data collection methods are carried out through observation, interviews, and document studies on village officials, BUMDES, tour operators, guides, the community, and tourists who are visiting. Data were analyzed using qualitative descriptive methods with steps: data reduction, data presentation, interpreting data, and drawing conclusions. Evaluative studies are conducted using indepth interviews, and direct observation in several aspects of evaluation and analysis of evaluation indicators consisting of system assessment, program planning, program implementation, program improvement, and program certification (Halaman 3)

Development and development of tourist objects and attractions must be based on local wisdom and a local special sense that reflects the uniqueness of cultural heritage and the uniqueness of the environment. This local wisdom is a part of the culture of a society that cannot be separated from the language of the community itself. that the very limited area of Bali will diminish if land-use change, especially agricultural land, cannot be dammed. This is experienced by Bali today. The implementation of policies that sometimes do not favor local communities is also an obstacle to the development of local community-based tourism. Usually, the development of tourism is more in favor of the owners of capital (capitalists) who easily change nature into something they want without looking at the interests of society socially, culturally, and economically sustainable for local communities.(Halaman 2)

According to the data obtained there has been a significant change or change in the function of paddy fields from 2012 data of 214 Ha to 201 Ha until 2017 (source: Sukasada Subdistrict in figures). This change was also expressed by Tomy Ahmadi et al., (2016), the area of rice fields in the past five years has decreased which is nothing but due to the conversion of land to non-agriculture and found too obstacles related to the existence of programs or activities that intersect socially and economically with neighboring villages, especially related to the management of borders that have mutual interests. This has not been able to be properly addressed by village communities, if not managed properly someday will cause conflicts between villages that border, things like this need to be managed well by the Sambangan tourism village management component. (Halaman 4)

From all evaluation components used as evaluation materials for the implementation of the tourism village development program, several problems and recommendations have been obtained that stem from the absence of clear guidelines for managing a sustainable tourism village. Many of the potential natural resources of the village of Sambangan are not yet utilized for tourism purposes, but among many potential natural resources have been touched by the community disproportionately and have the potential to destroy nature because of the lack of intellectual capacity of the community to use the values of local wisdom as a guide. If this is allowed to have an impact on the development of tourism that is not in accordance. (Halaman 6)

(Evaluasi Program : Implementasi Pengembangan Desa Wisata oleh I Gede Sudirtha dkk (2019). Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen pada aparat desa, BUMDES, operator wisata, pemandu, masyarakat, dan wisatawan yang berkunjung. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Kajian evaluatif dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, dan observasi langsung pada beberapa aspek evaluasi dan analisis indikator evaluasi yang terdiri dari penilaian sistem, perencanaan program, pelaksanaan program, perbaikan program, dan sertifikasi program.

Dalam pengembangan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata harus berlandaskan kearifan lokal dan rasa khas lokal yang mencerminkan keunikan cagar budaya dan keunikan lingkungan. Kearifan lokal ini merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak lepas dari bahasa masyarakat itu sendiri, namun wilayah Bali yang sangat terbatas akan berkurang jika alih guna lahan, terutama lahan pertanian, tidak dapat dibendung. Inilah yang dialami Bali saat ini. Implementasi kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat lokal juga menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal. Biasanya pembangunan pariwisata lebih berpihak pada para pemilik modal (kapitalis) yang dengan mudah mengubah alam menjadi sesuatu yang mereka inginkan tanpa memandang kepentingan masyarakat yang berkelanjutan secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Menurut data yang diperoleh telah terjadi perubahan atau perubahan fungsi sawah yang signifikan dari data tahun 2012 seluas 214 Ha menjadi 201 Ha sampai tahun 2017 (sumber: Kecamatan Sukasada dalam angka). Perubahan ini juga diungkapkan oleh Tomy Ahmadi dkk, (2016), luas areal persawahan dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan yang tidak lain karena adanya konversi lahan menjadi non pertanian dan ditemukan juga kendala terkait adanya program atau kegiatan yang bersinggungan secara sosial dan ekonomi dengan desa tetangga, terutama terkait dengan pengelolaan perbatasan yang memiliki kepentingan bersama, hal ini belum dapat diatasi dengan baik. . Oleh masyarakat desa, apabila tidak dikelola dengan baik suatu saat akan menimbulkan konflik antar desa yang berbatasan

Dari seluruh komponen evaluasi yang digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program pembangunan desa wisata, diperoleh beberapa permasalahan dan rekomendasi yang bersumber dari belum adanya pedoman yang jelas untuk pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Banyak potensi sumber daya alam desa Sambangan yang belum dimanfaatkan untuk tujuan wisata, namun diantara banyak potensi sumber daya alam tersebut telah tersentuh oleh masyarakat secara tidak proporsional dan berpotensi merusak alam karena kurangnya kapasitas intelektual masyarakat untuk menggunakan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pedoman. Jika hal ini dibiarkan akan berdampak pada perkembangan pariwisata).

Tabel 1.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEORI	HASIL PENELITIAN
1.	Muhammad Lukman Al Hakim (2015)	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya	Teori Evaluasi William Dunn	kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Surabaya telah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan. Sehingga hasil yang diharapkan belum bisa tercapai secara penuh. Berdasarkan hasil di lapangan faktor dominan yang menghambat tercapainya tujuan terletak pada minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, manajemen waktu tahun anggaran yang tidak terintegrasi dengan kondisi di lapangan, kurang responsivitas dan <i>political will</i> pemerintah setempat
2.	Rasminto (2018)	Evaluasi Implementasi Kebijakan	Evaluasi Program Model CIPP	penerapan kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi

		Zonasi Pertanian di Kabupaten Bekasi	<i>(Context, Input, Process, dan Product)</i> Stufflebeam	yakni terdapat penyimpangan pelaksanaan peraturan yang ada dalam Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi yakni ada 5 Pasal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tataruang bahwa dalam pemanfaatan ruang,
3.	I Gede Sudirtha, Ketut Widiartini, Made Suriani (2019)	Program Evaluation: Implementation of Tourism Village Development	<i>program evaluation model using the CSE-UCLA approach evaluates the program in five stages of evaluation, namely: assessment system, program planning, program implementation, program improvement,</i>	<i>The research began with an evaluation study using the UCLA CSE model approach. The results showed aspects of the development of Sambangan Village Bali have not yet maximally utilized natural resources or other resources as a viable tourism village product. (Penelitian diawali dengan studi evaluasi menggunakan pendekatan model</i>

			<i>and program certification.</i> (Model evaluasi CSE-UCLA yang dikembangkan oleh Alkin memiliki lima tahap evaluasi yaitu sistem penilaian, perencanaan program, pelaksanaan program, perbaikan program, dan sertifikasi program)	UCLA CSE. Hasil penelitian menunjukkan aspek pengembangan desa wisata di Desa Sambangan Bali belum secara maksimal memanfaatkan sumber daya alam atau sumber daya lain sebagai produk desa wisata yang layak)
--	--	--	---	---

Sumber : Diolah Peneliti

Sekian banyak penelitian terdahulu mengenai tesis yang mengambil topik dan permasalahan yang hampir sama, sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti sendiri, sehingga jelas perbedaan mengenai rumusan masalah, metode pendekatan yang digunakan, analisis data yang dilakukan serta hasil yang dicapai, sehingga akan nampak jelas perbedaan serta kajian masalah yang masih belum diteliti oleh para peneliti.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Selanjutnya mengenai evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya (Hakam, 2016).

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010, hal. 56), evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain seperti dikemukakan oleh Stutflebeam yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010, hal. 57), menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut Dimiyati & Mudjiono (2015, hal. 19), pengertian evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Menurut Arifin & Zainal (2019, hal. 45), mengatakan bahwa:

evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai

2.2.2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu policy yang digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Friedrich dalam Wonarno (2016:20) yang menyatakan bahwa:

“kebijakan adalah sebagai salah satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasi suatu sasaran dengan maksud tertentu”

Menurut Jones dalam Winarno (2016:19) menyatakan bahwa:“ kebijakan adalah digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda”

Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2016:20) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

2.2.3. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.3.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah disebut kebijakan publik, kebijakan negara atau kebijakan pemerintah. Diantara berbagai istilah tersebut, istilah yang banyak dipakai adalah kebijakan publik. Lalu apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan oleh lembaga masyarakat yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dapat dipahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum, akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang

harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, apakah menjadi Undang-undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus di taati.

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Karena itu ada banyak definisi mengenai kebijakan publik. Definisi mengenai kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya. Berikut beberapa definisi tentang kebijakan publik:

Menurut Anderson dalam Agustini (2016:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:

“ A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern ”. (kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan)

Menurut Easton dalam Agustino (2016:16) memknai kebijakan publik sebagai:

“kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintahan yang meempunyai otoritas dalam sitem politik”

Sementara itu menurut Chief J.O. Udoji dalam Wahab (2016:15)

menjelaskan bahwa:

“ *An sanctioned course of action addressed to a particular problem pr group of related problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagi besar warga masyarakat)

Sedangkan menurut Thomas Dye dalam Awan dan Yudi (2016:35)

mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah:

“kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan mandaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistim agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang benar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah peran pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.”

Kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruang khusus” (dalam Nugroho, 2017) seperti yang dituliskan oleh Kraft dan Furlog (2005:31)

“kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan dan norma nasional serta norma budaya lokal merupakan variabel yang lain.”

Adapun menurut Leumix dalam Wahab (2016:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu”

Nugroho (2017:41) mengemukakan tentang kebijakan publik atau kebijakan pemerintah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka kebijakan publik dibuat dalam rangka memecahkan masalah dan untuk tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang nyata dilakukan pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Dengan demikian kebijakan berorientasi pada tindakan.

2.2.3.2 Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Naumun demikian beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan berbeda.

Tahap-tahap kebijakan menurut Winarno (2016:35) sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya,

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2. Tahap Formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Sebuah program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

2.2.4. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus dievaluasi. Dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituennya. Sejauhmana

tujuan dicapai . Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Istilah evaluasi dalam analisis kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Enadarlita dan Asvio, 2019)

Menurut Dedy Mulyadi (2016:85) menjelaskan bahwa :

“evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal) pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebihh spesifik, evaluasi berkenan untuk produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”

Sementara itu menurut Dunn dalam Dedy Mulyadi (2016:86) menjelaskan bahwa:

“ Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebutmemberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas di atasi”

Menurut Sulistiyowati (132) dalam kamus lengkap bahasa indonesia

“mengartikan evaluasi sebagai penilaian “, Anderson dalam Suyatna (2019:60)

mengatakan :

Policy evaluation can be briefly defined as the appraisal or assessment of policy, including its contnt, implementation and inpact' (Evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi dan dampaknya)

Pemahaman pendapat tersebut di atas bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian atau pengukuran kebijakan yang tidak hanya implementasi saja tapi juga tentang isi dan dampak kebijakan.

Nugroho (2017:184) mengatakan bahwa : “Sesungguhnya evaluasi mempunyai tiga lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan pekerjaan “.

Pemahaman definisi diatas, mengartikan bahwa inti dari evaluasi adalah untuk menilai kebijakan dimana penilaian tersebut meliputi penilaian perumusan kebijakan, implementasi kebijakan maupun penilaian lingkungan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2016:122), secara konseptual ada pandangan yang menyatakan bahwa evaluasi dapat dilakukan pada seluruh periode kegiatan, artinya dapat dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan, evaluasi saat kegiatan berjalan, dan setelah kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan pandangan tersebut, evaluasi dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Pra evaluasi, yakni evaluasi yang dilakukan pada saat program belum berjalan atau beroperasi pada tahapan perencanaan
2. Evaluasi pada saat program tengah berjalan, yang dikenal dengan ongoing evaluation atau in operation evaluation.
3. Evaluasi setelah program selesai atau setelah program berakhir. Evaluasi ini biasanya disebut ex post evaluation.

Pemahaman teori tersebut menerangkan bahwa evaluasi kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih tujuan yang diinginkan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan di peroleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn dalam Dedy Mulyadi (2016:99-100) mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, anlis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif).
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.
4. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Berdasarkan pendapat Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan

dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.

Selain hal tersebut di atas, mengikuti Samodra dkk dalam Nugroho (2017 : 186-187) evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dengan evaluasi kebijakan dapat dilihat bagaimana realita dari suatu kebijakan, apakah suatu kebijakan sudah sesuai dengan standar dan prosedur, bagaimana output dari kebijakan apakah sampai pada sasaran atau tidak dan bagaimana akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Jones (1977) dalam Suyatna (2019:60) menyatakan bahwa:

Evaluasi dapat dipakai dengan dua tujuan : pertama untuk menilai hal-hal yang terjadi pada keseluruhan (semua) proses kebijakan dan kedua sebagai suatu usaha yang sistematis untuk menilai manfaat program-program pemerintah tertentu.

Penjelasan diatas adalah bahwa kegiatan pertama dilakukan pemerintah untuk melihat kembali atau mengantantisifasi atau menilai semua kemajuan-kemajuan yang dicapai pemerintah , sedangkan kegiatan kedua adalah usaha

mengidentifikasi metode metode sistimatis untuk menilai proram – program pemerintah misalnya dengan metode ekspremental, perbandingan, replikasi atau analisis biaya keuntungan.

Kegiatan penilaian menurut Jones (1977) dalam Suyatna (2009 :62)

bahwa :

Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan seperti yang di yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran

- dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
 6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas *substantive*, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Secara singkat kriteria evaluasi menurut Dun dalam Dedy Mulyadi (2016:610) dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Kriteria evaluasi kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai	Unit Pelayanan
Effisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Unit biaya, manfaat bersih, rasio Cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok kelompok yang berbeda	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor Hick, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.	Konsistensi dengan survei warganegara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar benar berguna atau bernilai	Program Publik harus merata dan efisien

Sumber: Dunn, (2016:610)

Pemahaman pendapat tersebut diatas bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat enam kriteria yang menjadikan patokan untuk evaluator untuk menilai kinerja dari kebijakan.

2.2.5. Tinjauan Tentang Kampung KB

2.2.5.1. Latar Belakang Kampung KB

Mendengar istilah “Kampung”, kesan yang muncul di pikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kolot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung.

Memang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kampung sangat identik dengan istilah-istilah seperti itu, begitu juga halnya dengan istilah Kampung KB yang akhir-akhir ini menjadi icon yang cukup populer tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK) dalam hal ini BKKBN, akan tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga departemen ataupun non-departemen mulai dari tingkat daerah sampai ketinggian pusat.

Memang, sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan januari 2016, bahwa Kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai

kepada masyarakat kalangan elit, dan bahkan tulisan-tulisan mengenai kampung KB banyak mengisi kolom-kolom pemberitaan di media massa (surat kabar, majalah, tabloid) dan bahkan menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan populer di media-media elektronik.

Lantas kenapa kampung KB ini dibentuk, ada beberapa hal yang melatar belakungnya, yaitu : (1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru, (2) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, (3) penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (4) mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia", (5) mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

2.2.5.2. Tujuan Pembentukan Kampung KB

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB

ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

2.2.5.3. Syarat-syarat Pembentukan Kampung KB

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu:

1. tersedianya data kependudukan yang akurat.
2. dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.
3. partisipasi aktif masyarakat

2.2.5.4. Kriteria Wilayah

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

Kriteria utama: yang mencakup dua hal, yaitu: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.

Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu: (1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Selanjutnya dalam menentukan kriteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh kriteria yang ada.

Kriteria Khusus: yang mencakup 5 hal, yaitu: (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat *unmet need* lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

2.2.5.5. Sasaran Kegiatan Kampung KB

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagamat, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

2.2.5.6. Kenapa Harus Kampung KB?

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung. Karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju. Dan apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.

2.2.5.7. Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BkbbN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu "satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis".

Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya.

Sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatar belakangi oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini di Indonesia. Karena bagi Negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh pada pembangunan. Karena jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah cukup banyak untuk suatu negara berkembang tetapi kualitas hidup atau kemakmurannya masih rendah dilihat berdasarkan GDP (Gross Domestic Product) atau biasa disebut PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita yang relatif rendah. Kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan penghambat pembangunan di beberapa sektor. Oleh karena itu pada tanggal 29 Juni 1970 merupakan puncak kristalisasi pejuang Keluarga Berencana untuk memperkuat program Keluarga Berencana (KB). Sesungguhnya, Program KB di Indonesia sudah dimulai sejak 23 Desember 1957 yang di bentuk di gedung Ikatan Dokter Indonesia.

Namun, program KB saat itu masih menjadi urusan kesehatan dan belum tentang urusan kependudukan. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia serta tingginya angka kematian ibu dan kebutuhan akan kesehatan reproduksi, program KB selanjutnya digunakan sebagai salah satu cara untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Awalnya, jangkauan program KB ke seluruh Indonesia dilakukan setahap demi setahap. Dalam Repelita I, program ini hanya dilaksanakan di Jawa-Bali yang sangat padat penduduk-nya. Selanjutnya, dalam Repelita III jangkauannya mencakup seluruh provinsi di seluruh Indonesia.

Seiring berjalannya waktu menurut Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian.

Oleh karena itu, dalam rangka penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB.

Menurut Arifin & Zainal (2010, hal. 45), mengatakan bahwa:

“evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi”. Hal yang sama juga disampaikan oleh Purwanto & Ngalim (2010, hal. 57).

Menurut Dunn (2003: 51-53) menjelaskan secara etimologi bahwa:

“Istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin akar kata dari bahasa Yunani dan Sanskerta *Polis* (Negara-Kota) dan *Pur* (Kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin yaitu *Politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris yaitu *Policie* yang artinya menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”.

Menurut Easton dalam Agustino (2016:16) memknai kebijakan publik sebagai:

“kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintahan yang mempunyai otoritas dalam sistem politik”

Sedangkan menurut Jones (1977) dalam Suyatna (2009:60) menyatakan bahwa:

Evaluasi dapat dipakai dengan dua tujuan : pertama untuk menilai hal-hal yang terjadi pada keseluruhan (semua) proses kebijakan dan kedua sebagai suatu usaha yang sistematis untuk menilai manfaat program-program pemerintah tertentu.

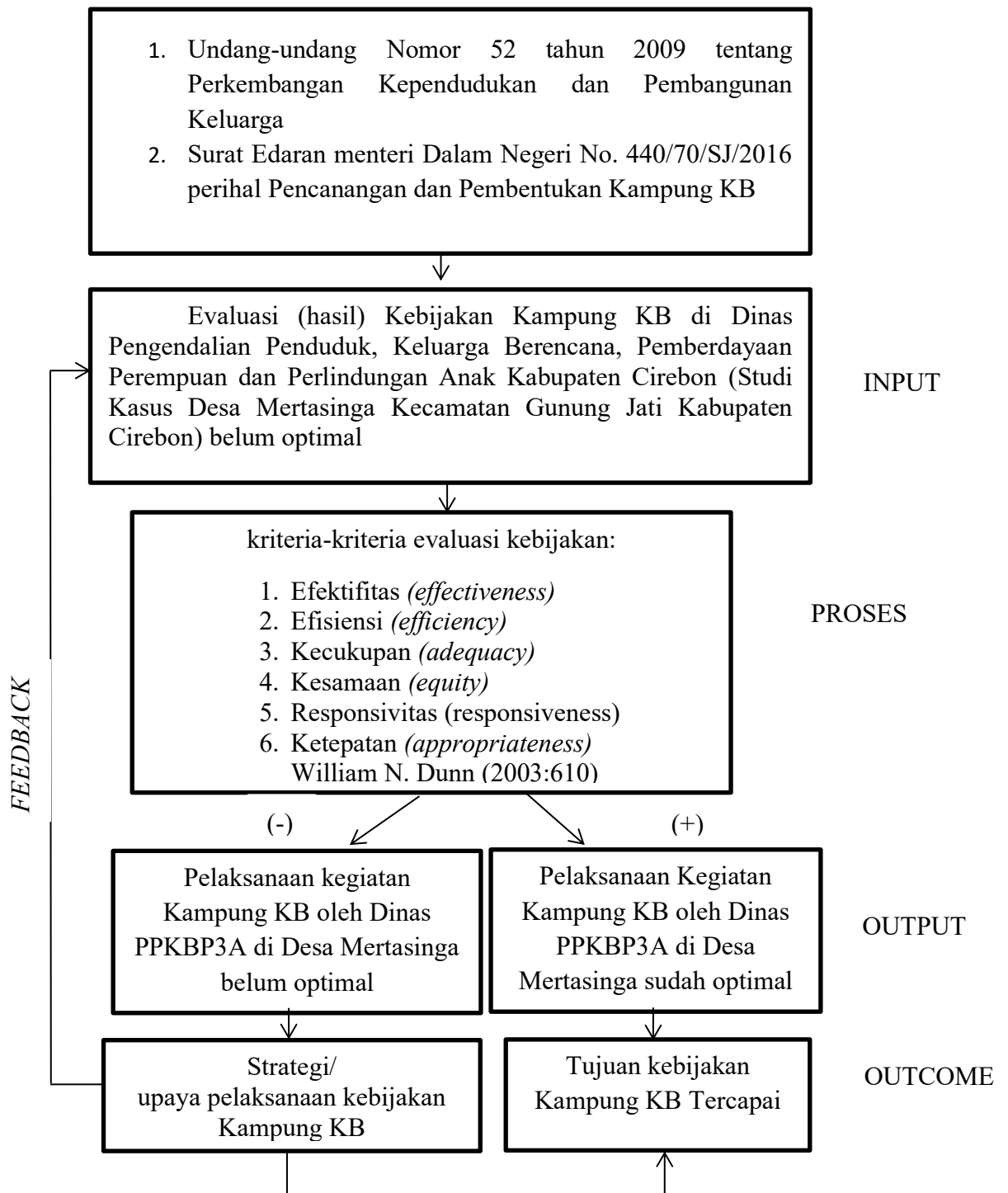
Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan seperti yang di yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*)
2. Efisiensi (*efficiency*)
3. Kecukupan (*adequacy*)
4. Kesamaan (*equity*)
5. Responsivitas (*responsiveness*)
6. Ketepatan (*appropriateness*)

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dinilai apakah Evaluasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Mertasinga telah efektif dilaksanakan sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini :



Gambar 2.1.
Model Kerangka Pemikiran
Evaluasi Kampung KB

2.4. Proposisi

Menurut Sulistiyowati (132) Evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi dan dampaknya.

Pemahaman pendapat tersebut di atas bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian atau pengukuran kebijakan yang tidak hanya implementasi saja tapi juga tentang isi dan dampak kebijakan.

Ada beberapa faktor dan parameter evaluasi yang dapat mengukur apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan berjalan secara optimal atau tidak.

Dengan dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan program Kampung KB di Desa Mertasinga maka dapat dilihat apa saja kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan program Kampung KB sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai secara optimal.

Sehingga dari uraian dan penjelasan diatas, maka proposisi yang merupakan pernyataan tentang sifat dari relitas yang dapat diuji keberadaannya dari penelitian ini sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum efektifnya kebijakan Kampung KB Dusun Jenawi dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi seperti rendahnya kualitas dan kuantitas kader dan TPD yang mengakibatkan pelaksanaan program kurang maksimal, adanya dampak pemilihan kuwu yang berakibat pada adanya perubahan kepengurusan kader secara mendadak, adanya

partisipasi masyarakat yang rendah, tidak adanya dana desa yang proaktif terhadap pelaksanaan program Kampung KB padahal dalam pelaksanaannya program ini membutuhkan banyak dana, dan koordinasi dan kolaborasi antara sektor-sektor terkait masih belum optimal disamping itu ego sektoral masing-masing sektor pun masih tinggi.

2. Melalui evaluasi kebijakan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program Kampung Kb di Desa Mertasinga Dusun Jenawi.